

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

RIZQULLAH MUBARAK LAJUNA EFFENDY JARAPUTRA
NPM : 2102110075



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 03 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIZQULLAH MUBARAK LAJUNA EFFENDY JARAPUTRA
NPM : 2102110075

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

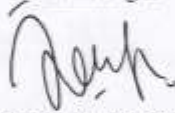
Ketua Program Studi
Akuntansi


I. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Pembimbing II


Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001



Mengetahui,
Kepanitiauan Fakultas Ekonomi


Drs. Farni Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 03 Februari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RIZQULLAH MUBARAK LAJUNA EFFENDY JARAPUTRA
NPM : 2102110075

Dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 1 Februari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Elviza, S.E., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Anggota

Irmawati, S.E., M.Si, Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



R. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19741019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 03 Februari 2024
Yang Menyatakan



Rizqullah Mubarak Lajuna Effendy
Jaraputra

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizqullah Mubarak Lajuna Effendy Jaraputra
NPM : 2102110075
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Rizqullah Mubarak Lajuna Effendy
Jaraputra

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, pengarahan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Atas segala limpahan rahmad , hidayah, serta karunia-Nya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Bapak Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibu Elviza, S.E.,M.Si. dan Ibu Intan Rizka Chudri, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
8. Seluruh Dosen, staf pengantar, karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
9. Kedua orang tuaku Dr. H. Effendy Jafar Jaraputra, SH, S.Sos. M.Si dan Hj.Isnani Ismail,SE.Ak dan kakak-kakakku RA Phonna Effendy Jaraputri, SH, MKn, RA Akhena Effendy Jaraputri, S.Pd dan adikku RM Geubrina Effendy Jaraputra yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Januari 2024

Rizqullah Mubarak Lajuna Effendy Jaraputra

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Efisiensi.....	7
2.1.2 Efektifitas	8
2.1.3 Jenis-Jenis Fungsi Anggaran.....	11
2.1.4 Struktur Anggaran.....	12
2.1.5 Belanja Modal dan Investasi Publik.....	14
2.2 Penelitian Sebelumnya	16
2.3 Kerangka Pemikiran	19
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	21
3.1.1 Tujuan Penelitian.....	21
3.1.2 Tingkat Intervensi Penelitian.....	21
3.1.3 Horizon Waktu.....	22
3.1.4 Unit Analisis.....	22
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	22
3.3 Teknik Analisis Data.....	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum BPSDM Aceh.....	25

	4.1.1 Sejarah Singkat BPSDM Aceh.....	25
26	4.1.2 Visi dan Misi BPSDM Aceh.....	
27	4.1.3 Tugas dan Fungsi BPSDM Aceh.....	
29	4.2 Hasil Penelitian.....	
29	4.2.1 Analisis Rasio Keuangan BPSDM Aceh.....	
	4.2.1.1 Rasio Efisiensi.....	29
30	4.2.1.2 Rasio Efektivita.....	
32	4.3 Analisis dan Evaluasi.....	
32	4.3.1 Analisis Efisiensi Anggaran BPSDM Aceh.....	
33	4.3.2 Analisis Efektivitas Anggaran BPSDM Aceh.....	
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
35	5.1 Kesimpulan.....	
	5.2 Saran.....	36
 DAFTAR PUSTAKA.....		37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 3.1	Interprestasi Nilai Efektivitas	24
Tabel 3.2	Interprestasi Nilai Efisiensi.....	24
Tabel 4.1	Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020-2022.....	30
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020-2022.....	31
Tabel 4.3	Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh.....	32
Tabel 4.4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1	Sruktur Organisasi.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh Tahun 2020
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh Tahun 2021
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh Tahun 2022

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM) ACEH**

**RIZQULLAH MUBARAK LAJUNA EFFENDY JARAPUTRA
NPM: 2102110075**

Pembimbing I: Elviza, S.E., M.Si

Pembimbing II: Intan Rizka Chudri, S.E., M. Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Adapun metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis anggaran belanja pada BPSDM Aceh Tahun 2020-2022. Perkembangan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran BPSDM Aceh Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan nilai Cukup Efisien (89,64% dan 88,74%) dan Tahun 2022 dengan nilai Kurang Efisien (96,08%). Perkembangan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran BPSDM Aceh Tahun 2020 dan 2021 dengan nilai Cukup Efektif (89,64% dan 88,74%), sedangkan untuk Tahun 2022 dengan nilai Efektif (96,08%).

Kata kunci : (Efisiensi, Efektivitas, Anggaran Belanja)

***ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF SPENDING
BUDGET IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AGENCY
(BPSDM) ACEH***

**RIZQULLAH MUBARAK LAJUNA EFFENDY JARAPUTRA
NPM: 2102110075**

Supervisor I: Elviza, S.E., M.Si

Supervisor II: Intan Rizka Chudri, S.E., M. Si

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the level of efficiency and effectiveness of budget management at the Aceh Human Resources Development Agency (BPSDM). The research methodology uses a qualitative approach, namely by identifying and analyzing the expenditure budget at BPSDM Aceh for 2020-2022. Development of the level of efficiency in implementing the Aceh BPSDM budget in 2020 and 2021 with a value of Quite Efficient (89.64% and 88.74%) and in 2022 with a value of Less Efficient (96.08%). The development of the level of effectiveness of the Aceh BPSDM budget implementation for 2020 and 2021 with a value of Quite Effective (89.64% and 88.74%), while for 2022 with an Effective value (96.08%).

Keywords: *(Efficiency, Effectiveness, Shopping Budget)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan anggaran pemerintah harus mengacu pada *system* penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*imput*), dan hasil yang diharapkan (*outcomes*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan (Trianto, 2016).

Dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, tetapi juga memainkan peran sentral dalam menentukan nasib dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa sekarang, pengelolaan anggaran pemerintah lebih mengacu pada sistem penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja diformulasikan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*), sehingga memberikan informasi yang lebih menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintah.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah sebuah lembaga yang berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah atau negara. Kantor BPSDM dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola program pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memiliki kaitan

yang erat dengan pelaksanaan anggaran belanja, terutama dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di wilayah Aceh.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh undang-undang ini harus dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah, menekankan pentingnya koordinasi dan implementasi rencana pembangunan di seluruh wilayah negara. Hal ini menunjukkan pentingnya menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah dengan rencana pembangunan yang telah disusun.

Proses dimulai dengan penyusunan perencanaan, yang kemudian diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan efektivitas dan efisiensi dari perencanaan yang telah disusun. Anjuran perencanaan berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara perencanaan nasional dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Menurut Mardiasmo (2014:32) pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sedangkan menurut Mario (Mario, 2014:134) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasi pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui ukuran efektivitas.

Aceh memiliki perlakuan khusus sesuai dengan UU Nomor 11/2006 tentang pemerintahan Aceh. Di Aceh, istilah Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) digunakan sebagai pengganti istilah satuan kerja perangkat daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh merupakan salah satu perangkat daerah provinsi Aceh yang bertanggung jawab melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penyusunan Anggaran didasarkan pada peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Umumnya penyusunan dilakukan dengan cara melakukan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyusunan rancangan perda APBD, dan penetapan APBD. Untuk tercapainya pelaksanaan dan penatausahaan APBD yang baik jadi tidak terlepas dari adanya pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran (pengawasan melekat), menekankan pentingnya tanggung jawab langsung dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

Pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan *output* terhadap pencapaian tujuan, dengan demikian semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sedangkan menurut penelitian Tuju (2016:72), menyatakan efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya dengan demikian proses dikatakan semakin efisien.

Prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan anggaran daerah dan menghubungkannya dengan dampak yang mungkin terjadi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan. Karena itu dengan mengutamakan prinsip-prinsip manajemen anggaran yang efisien dan efektif, serta memastikan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan rincian data mengenai perencanaan dan realisasi anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dari tahun 2020 hingga 2022 :

Tabel 1.1
Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2020-2022 pada BPSDM Aceh

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2020	99.180.208.498,00	88.906.420.072,00	89.64

2021	208.848.070.489,00	185.325.293.861,00	88.74
2022	190.532.972.899,00	183.056.258.365,00	96.80

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan rencana anggaran Tahun 2020 rencana anggaran total Rp99.180.208.498,00 terealisasi sebesar Rp88.906.420.072,00 atau (89.64%). Pada Tahun 2021 rencana anggaran Rp208.848.070.489,00 terealisasi sebesar Rp185.325.293.861,00 atau (88.74%). Dan pada Tahun 2022 rencana anggaran sebesar Rp190.532.972.899,00 dan terealisasinya sebesar Rp183.056.258.365,00 atau (96.8%), umumnya hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang terealisasi tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang ada pada rencana anggaran semula, meskipun Tahun 2022 rencana anggaran menurun dibandingkan Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menganalisis anggaran pada BPSDM Aceh melalui penelitian yang berjudul **“Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada BPSDM Aceh pada Tahun 2020 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada BPSDM Aceh pada Tahun 2020 – 2022 agar efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi literature terhadap penelitian Akutansi Sektor Publik, khususnya mengenai pengeluaran pemerintah pada kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dan menjadi acuan bagi mahasiswa/i dalam mengkaji dan mengembangkannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh pada periode tahun 2020- 2022.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan Teoritis

1.1.1 Efisiensi

Teori efisiensi anggaran mencakup kemampuan organisasi atau lembaga dalam memaksimalkan *output* atau hasil yang diinginkan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya atau biaya. Fokus utama dari teori ini adalah penggunaan optimal sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pada dasarnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan pengelolaan sumber daya secara hemat dan efisien. Menurut Heri Sudarsono (2020), efisiensi anggaran menitikberatkan pada optimalisasi biaya untuk mencapai *output* yang diinginkan.

Pada umumnya, teori efisiensi dalam konteks pengelolaan anggaran dapat merujuk pada berbagai konsep dan pendekatan yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Landasan untuk teori efisiensi (Mardiasmo, 2003:67) dalam pengelolaan anggaran melibatkan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi. Berikut adalah beberapa bahan yang dapat menjadi dasar teori efisiensi:

a. Prinsip-Prinsip Manajemen

Penggunaan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti *Total Quality Management (TQM)* atau *Lean Management*, dapat membantu

meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan proses, dan meminimalkan risiko.

b. Analisis *Cost-Benefit* (Biaya-Manfaat)

Teori efisiensi anggaran seringkali berkaitan dengan analisis *cost-benefit*, di mana organisasi berupaya memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari penggunaan sumber daya melebihi biaya yang dikeluarkan.

c. Teknik dan Alat Manajemen Keuangan

Penerapan teknik dan alat manajemen keuangan, seperti *budgeting* yang baik, pengendalian biaya, dan alokasi sumber daya yang tepat, merupakan bagian dari teori efisiensi anggaran.

d. Pengukuran Kinerja

Penggunaan metrik dan indikator kinerja untuk menilai sejauh mana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya.

e. Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran melalui otomatisasi proses, pemantauan *real-time*, dan analisis data.

1.1.2 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Menurut Siagian (2009:11) memberikan definisi bahwa Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Abdulrahmat (2003:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Teori efektivitas anggaran berkaitan dengan sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menciptakan dampak yang diinginkan. Fokus utama dari teori ini adalah evaluasi sejauh mana suatu organisasi atau lembaga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan anggarannya. Heri Sudarsono (2020) menyebutkan bahwa efektivitas anggaran menyoroti pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari penggunaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, efektivitas anggaran membahas sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil memberikan dampak positif sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2002:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Teori Efektivitas dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk dalam manajemen organisasi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Pendekatan ini membantu menganalisis, merancang, dan meningkatkan sistem atau proses agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien.

1.1.3 Jenis-Jenis Fungsi Anggaran

Anggaran Operasional merupakan Anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambahkan aset pemerintah.

Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non-investasi, pembayaran bunga, hutang, subsidi, dan belanja operasional. Sedangkan Anggaran Modal /Investasi merupakan Anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot kantor. Belanja modal merupakan bagian dari anggaran modal/investasi.

Fungsi anggaran dalam sektor publik dapat dilihat melalui beberapa perspektif yang beragam, yaitu:

- a. Alat perencanaan, anggaran digunakan sebagai instrumen untuk merumuskan tujuan, kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana, dan sumber pembiayaan, termasuk indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.
- b. Alat pengendalian, anggaran menjadi instrumen yang dapat mengontrol pemborosan pengeluaran. Pemerintah menyajikan rencana detail tentang penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik berdasarkan anggaran yang diajukan.
- c. Alat kebijakan fiskal, anggaran mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, memungkinkan prediksi dan estimasi ekonomi, serta mengkoordinasikan kegiatan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan.
- d. Alat politik, anggaran merupakan dokumen politik yang mencerminkan komitmen dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait penggunaan dana publik.
- e. Alat koordinasi dan komunikasi, anggaran digunakan untuk mengkoordinasikan bagian dalam pemerintahan dan berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
- f. Alat penilaian kinerja, mengevaluasi pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebagai wujud komitmen eksekutif kepada legislatif.
- g. Alat pemotivasi, anggaran dapat memotivasi eksekutif dan stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
- h. Alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, baik kelompok terorganisir maupun yang

tidak terorganisir. Dengan berbagai fungsi ini, anggaran sektor publik menjadi instrumen penting dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan berbagai aspek kegiatan pemerintahan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

1.1.4 Struktur Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2014:100-112) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipahami sebagai suatu rangkaian yang terinci. Pendapatan Daerah, sebagai hak pemerintah daerah untuk menambah nilai kekayaan bersih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, terdapat Dana Perimbangan yang melibatkan dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup hibah, dana darurat dari pemerintah, dan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.

Dalam konteks ini Belanja Daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih, terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung, melibatkan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Kemudian, Belanja Langsung yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Adapun Pembiayaan Daerah, yang mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, melibatkan penerimaan pembiayaan seperti selisih lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara pengeluaran pembiayaan melibatkan pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi pemerintah daerah). Dengan demikian, struktur APBD ini mencakup berbagai elemen yang menjelaskan sumber dan penggunaan anggaran secara rinci dalam konteks pemerintahan daerah.

1.1.5 Belanja Modal dan Investasi Publik

Belanja Modal, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki peran sentral dalam pembentukan modal pemerintah daerah. Konsep ini menekankan bahwa pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam Belanja Modal memiliki manfaat yang melebihi satu tahun anggaran dan bertujuan untuk menambah aset atau kekayaan daerah. Dalam praktiknya, Belanja Modal mencakup berbagai pengeluaran seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset pemerintah. Teoritis, tiga cara umum

untuk memperoleh aset tetap tersebut termasuk membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau membeli.

Beberapa ahli, seperti Dewi (2006) dan Syaiful (2008), menyatakan bahwa Belanja Modal bukan hanya mencakup pembentukan modal, tetapi juga melibatkan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bertujuan mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat, kapasitas, dan kualitas aset. Klasifikasi Belanja Modal, seperti yang diuraikan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, memberikan panduan terstruktur mengenai jenis-jenis Belanja Modal, seperti Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik lainnya.

Klasifikasi Belanja Daerah membagi belanja menjadi dua kategori utama, yaitu Belanja Tidak Langsung, yang melibatkan pengeluaran tidak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dan Belanja Langsung, yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Keseluruhan, Belanja Modal merupakan instrumen vital dalam strategi pembangunan daerah yang mencakup pembentukan modal, pemeliharaan aset, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Belanja modal dan investasi publik adalah dua komponen krusial dalam kebijakan fiskal pemerintah, membentuk landasan bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Belanja modal, yang mencakup pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta pembelian aset tetap seperti tanah dan mesin, berfungsi sebagai katalisator untuk

peningkatan infrastruktur dan daya saing wilayah. Pemerintah pusat dan daerah masing-masing memiliki belanja modalnya sendiri, mengarah pada pembangunan infrastruktur yang bersifat lokal maupun nasional.

Fungsi belanja modal tidak hanya mencakup peningkatan infrastruktur, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis. Sementara itu, investasi publik melibatkan alokasi dana pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi ini dapat berupa proyek-proyek langsung atau peningkatan dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, investasi publik dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Baik belanja modal maupun investasi publik memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keputusan strategis terkait alokasi sumber daya dalam kedua komponen ini perlu diambil dengan cermat, mempertimbangkan analisis dampak dan prioritas pembangunan nasional. Sehingga, belanja modal dan investasi publik dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya terkait dengan judul penelitian pernah di lakukan oleh Fahlevi dan Ananta (2015). Penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Kota Banda Aceh. Data penelitian bersumber dari Pemerintah Kota di Banda Aceh. Hasil Penelitian menunjukan tingginya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung di SKPD dengan variasi efisiensi dan efektivitas anggaran. Selain itu ditemukan bahwa isi perencanaan merupakan masalah rutin yang menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tulangow (2016), dengan mengambil judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Dengan tujuan untuk mengetahui baik tidaknya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurang baik karena Pemerintah Kabupaten Minahasa hanya berfokus pada belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai dan hasil analisis juga menunjukkan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.

Selanjutnya di lakukan oleh Muriyanti,(2017) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil Penelitian menunjukan tingkat efektivitas sangat efektif, dengan rata-rada

diatas 100%, tingkat efisiensi terjadi penurunan karena Pemerintah Kabupaten Wonogiri banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Cindy dkk, (2018) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan tujuan untuk menilai Efektifitas dan Efisiensi kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan dari tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara cukup efektif walaupun ada program yang terealisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan tingkat efisiensi sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi dengan penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum yang berada dibawah 60%.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh, Siti Mardhiyah Ulfa (2018) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sudah efektif dengan mencapai 100% yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat dan tingkat efisiensi sudah efisiensi dengan mencapai 100%.

Penjelasan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan juga dapat dilihat secara ringkas pada table berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fahlevi dan Ananta (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung - Studi pada SKPD di Kota Banda Aceh	Menunjukkan tingginya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung di SKPD dengan variasi efisiensi efektivitas anggaran. Selain itu ditemukan bahwa isu perencanaan merupakan masalah rutin yang menyebabkan rendahnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung.	Persamaan Objek penelitian,yaitu menganalisis realisasi anggaran	Perbedaan lokasi penelitian,dan waktu penelitian
2	Andre P. Tungalo W dan Treesje Runtu (2016)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa (2013-2015)	Menunjukkan bahwa realisasi kinerja pendapatan daerah kabupaten Minahasa dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians tahun 2013- 2015 dapat dikatakan kurang baik, karena realisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan	Persamaan Objek Penelitian yaitu mengenai Analisis Anggaran	Perbedaan lokasi penelitian dan waktu penelitian
3	Kiky Muryanti (2017)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	Menunjukkan tingkat efektivitas sangat efektif, dengan rasio efektivitas rata-rata diatas 100%, tingkat efisiensi terjadi penurunan karena pemerintah Kabupaten Wonogiri banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal	Persamaan Objek Penelitian, yaitu mengenai Analisis Realisasi anggaran	Perbedaan lokasi penelitian dan waktu penelitian

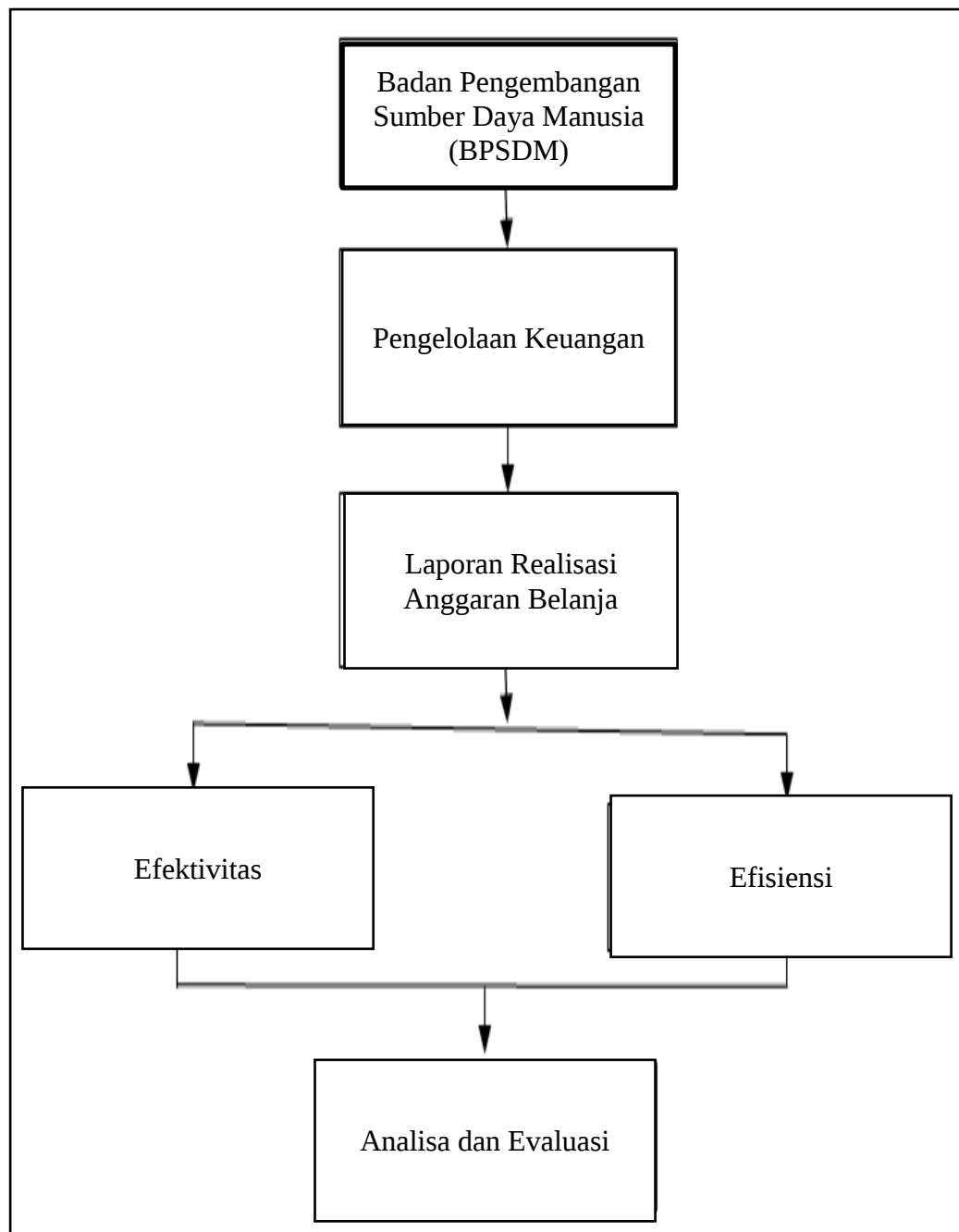
No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Cindy,D kk (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Sulawesi Utara	Dari tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Perternakan Provinsi Sulawesi Utara cukup efektif walaupun ada program yang terealisasi tidak sesuai dengan target yang diterapkan. Sedangkan tingkat efisiensi sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi dengan penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum yang berada dibawah 60%	Persamaan Objek Penelitian, yaitu mengenai Analisis Realisasi Anggaran	Perbedaan lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Siti Mardhiyah Ulfa (2018)	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan	Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sudah efektif dengan pencapaian 100% yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat dan tingkat efisiensi sudah efisien dengan mencapai 100%	Persamaan Objek Penelitian, yaitu mengenai Analisis Realisasi Anggaran	Perbedaan lokasi penelitian dan waktu penelitian

1.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah (BPSDM) Aceh dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah (BPSDM) Aceh tidak terlepas dalam kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator dalam menghadapi pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah,tinjauan teoritis,dan tinjauan penelitian sebelumnya maka penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan realisasi

anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

1.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan APBD oleh BPSDM Aceh pada tahun 2020 – 2022 dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan serta upaya perbaikan yang dapat diusulkan guna meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020-2022.

1.1.2 Tingkat Intervensi Penelitian

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal di mana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah Realisasi

Anggaran Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020-2022.

1.1.3 Horizon Waktu

Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis *time series* mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

1.1.4 Unit Analisis

Data yang diperoleh secara individu dimanfaatkan untuk mengukur analisis pada tingkat akumulasi yang lebih tinggi. Ciri khas dari tingkat analisis ini adalah inklusi tingkat yang lebih rendah ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang terkumpul, bersama dengan tingkat di mana data diakumulasi untuk analisis, menjadi bagian integral dari keputusan yang diambil dalam menentukan unit analisis. Dalam konteks penelitian ini, unit analisis yang diberlakukan adalah bidang keuangan.

1.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan tempat di mana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam memilih sumber data, peneliti perlu mempertimbangkan kelengkapan dan validitas informasi yang akan dikumpulkan. Menurut Sutopo (2018:56), "Pemahaman tentang berbagai macam sumber data sangat penting bagi

peneliti karena keberhasilan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan memengaruhi akurasi, kekayaan, dan kedalaman informasi yang diperoleh. Data sekunder adalah informasi yang telah dilaporkan dan dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain di luar peneliti, meskipun data tersebut pada dasarnya bersumber dari sumber asli. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai instansi, perpustakaan, dan pihak lainnya.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dengan fokus utama pada studi literatur dari perpustakaan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan dan analisis berbagai sumber informasi seperti buku, teks, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap informasi yang bersumber langsung dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Dokumen-dokumen seperti profil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, laporan keuangan, dan data lainnya akan menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi terkini dan spesifik terkait dengan topik penelitian ini.

1.3 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan analisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dengan dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran.

Berikut adalah rumus untuk mengukur efektivitas dan interpretasi nilai efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Anggaran}) / (\text{Target Anggaran Belanja}) \times 100$$

Sumber : Mahsun, 2014

Kemampuan keuangan dikategorikan sebagai sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, atau tidak efektif berdasarkan rentang persentase.

Tabel 3.1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: : Kepmendagri No.690.900-327,1996.

Berikut adalah rumus untuk mengukur efisiensi dan interpretasi nilai efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \text{Realisasi Anggaran Belanja} / (\text{Anggaran Belanja}) \times 100$$

Sumber : Mahsun (2014:84)

Kemampuan keuangan dikategorikan sebagai sangat efisien, efisien, cukup efisien, kurang efisien, atau tidak efisien berdasarkan rentang persentase.

Tabel 3.2
Interpretasi Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: : Kepmendagri No.690.900-327,1996.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat BPSDM Aceh

Badan Pengembangan Sumber Manusia Aceh (BPSDM) Aceh merupakan sebuah instansi Pemerintah Aceh yang bertugas menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia, aparatur dan non aparatur Aceh. BPSDM Aceh terletak di Jalan T. Panglima Nyak Makam No.8 Banda Aceh Kode Pos 23125.

BPSDM Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dimana sebelumnya bernama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melekat dengan tugas-tugas administrasi kepegawaian. Konsekuensi yuridis dengan ditetapkannya Qanun tersebut membentuk dua institusi dengan nomenklatur baru yaitu BPSDM Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh (BKA). Berimplikasi pada tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik, fokus dan berdampak strategis dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Aceh.

BPSDM Aceh tidak hanya lagi sebagai badan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi

sertifikasi penyelenggaraan diklat dan kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi aparatur.

Konsekuensi lain dari pemisahan BKPP menjadi Badan Kepegawaian Aceh (BKA) dan BPSDM Aceh akan memberi ruang dan gerak yang lebih luas dan terfokus bagi BPSDM baik dalam untuk menjalankan Badan yang juga memiliki fungsi sertifikasi. Sebagai dalam konteks Nasional, fungsi ini ditambah dengan fungsi standarisasi yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan diklat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedudukan dan fungsi yang demikian strategis dalam mengembangkan kompetensi Aparatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja BPSDM Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi BPSDM Aceh

Adapun visi dan misi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

VISI:

”Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan”.

MISI:

”Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
 Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia”

4.1.3 Tugas dan Fungsi BPSDM Aceh

Tugas:

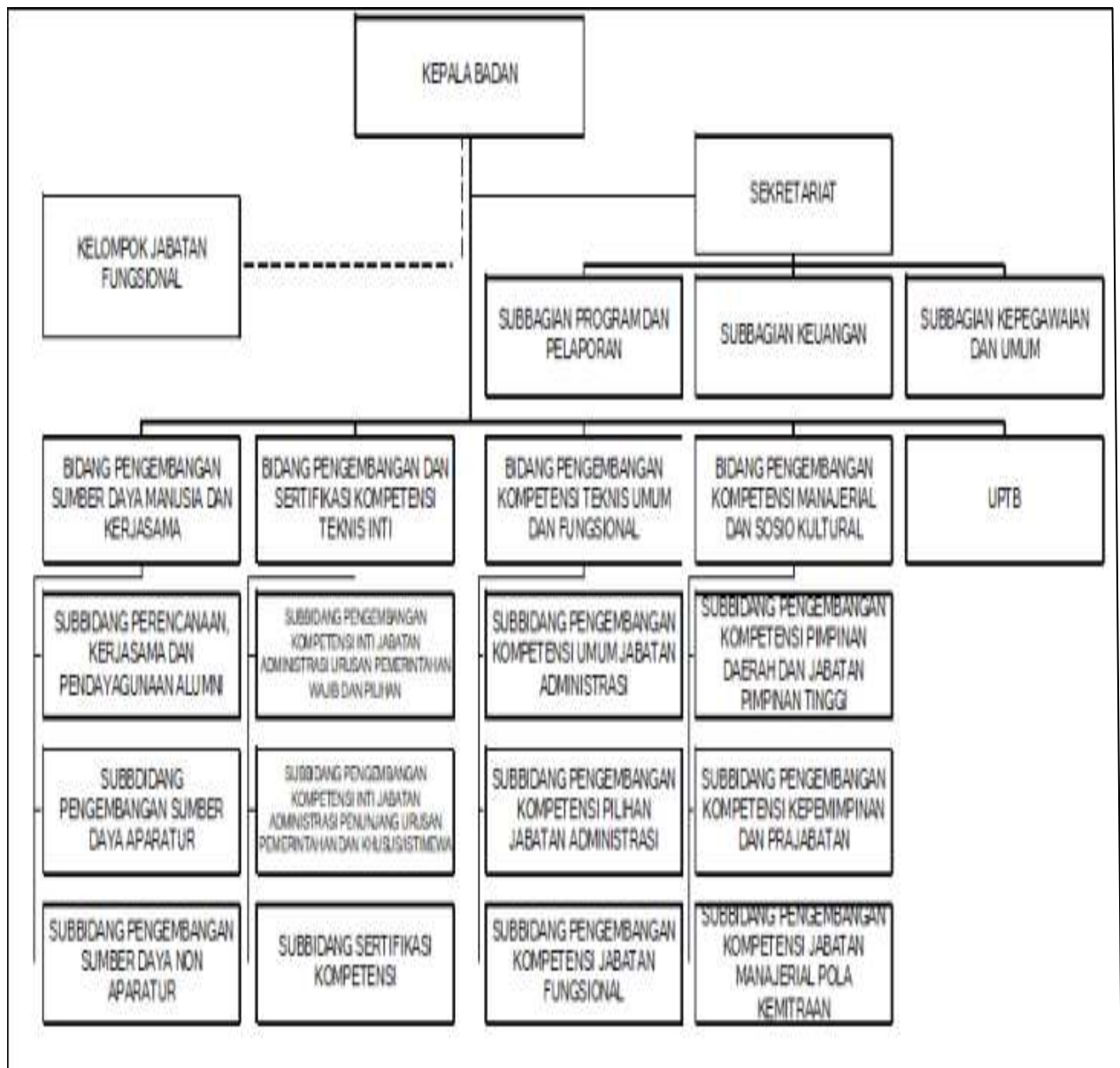
”Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia dan aparatur di provinsi.
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota.

- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.
- f. Pembinaan UPTB; dan
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis rasio Keuangan BPSDM Aceh

4.2.1.1 Rasio Efisiensi

Efisiensi secara umum adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Analisis efisiensi menggambarkan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang lebih hemat. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada BPSDM Aceh Tahun 2020 S.d 2022, maka Rasio Efisiensi sebagai berikut:

1. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}183.056.258.365,00}{\text{Rp}190.561.251.866,00} \times 100\% = 96,08\%\end{aligned}$$

2. Tahun 2021

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Target Anggaran Belanja

$$= \frac{\text{Rp}185.325.293.861,00}{\text{Rp}208.848.070.489,00} \times 100\% = 88,74\%$$

1. Tahun 2022

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp}183.056.258.365,00}{\text{Rp}190.561.251.866,00} \times 100\% = 96,08\%$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh
Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas
2020	99.180.208.498,00	88.906.420.072,00	89,64%
2021	208.848.070.489,00	185.325.293.861,00	88,74%
2022	190.532.972.899,00	183.056.258.365,00	96,08 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebesar Rp99.180.208.498,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp88.906.420.072,00,- dengan Tingkat persentase 89,64% dari total anggaran belanja. Pada Tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp208.848.070.489,00,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp185.325.293.861,00,- dengan tingkat persentase 88,74% dari total anggaran belanja. Dan pada Tahun 2022

Anggaran belanja sebesar Rp99.180.208.498,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp88.906.420.072,00,- dari total anggaran belanja.

4.2.1.2 Rasio Efektivitas

Analisis efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja daerah yang sudah direncanakan dan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas anggaran belanja daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja pada keuangan pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 s.d 2022, maka Rasio efektivitas sebagai berikut, Mahsun (2009):

1. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp88.906.420.072,00}}{\text{Rp99.180.208.498,00}} \times 100\% = 89,64\%\end{aligned}$$

2. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp185.325.293.861,00}}{\text{Rp208.848.070.489,00}} \times 100\% = 88,74\%\end{aligned}$$

3. Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Target Anggaran Belanja

$$= \frac{\text{Rp}183.056.258.365,00}{\text{Rp}190.561.251.866,00} \times 100\% = 96,08\%$$

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh
Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas
2020	99.180.208.498,00	88.906.420.072,00	89,64%
2021	208.848.070.489,00	185.325.293.861,00	88,74%
2022	190.532.972.899,00	183.056.258.365,00	96,08 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebesar Rp99.180.208.498,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp88.906.420.072,00,- dengan tingkat persentase atau 89,64% dari total anggaran belanja. Pada Tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp208.848.070.489,00,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp185.325.293.861,00,- dengan tingkat persentase atau 88,74% dari total anggaran belanja. Dan pada Tahun 2022 Anggaran belanja sebesar Rp99.180.208.498,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp88.906.420.072,00,- dari total anggaran belanja.

4.3. Analisis dan Evaluasi

4.3.1 Analisis Efisiensi Anggaran BPSDM Aceh

Efisiensi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2020	99.180.208.498,00	88.906.420.072,00	89,64%	Cukup Efisien
2021	208.848.070.489,00	185.325.293.861,00	88,74%	Cukup Effisien
2022	190.532.972.899,00	183.056.258.365,00	96,08 %	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas mengenai realisasi anggaran BPSDM Aceh Tahun 2020 sampai Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp88.906.420.072,00 dari total anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp99.180.208.498,00 dengan tingkat persentase 89,64%. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup Efisien.
2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh sebesar Rp185.325.293.861,00 dari total anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp208.848.070.489,00 dengan tingkat persentase 88,74%. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup Efisien.

3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp183.056.258.365,00 dari total anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp190.532.972.899,00 dengan tingkat persentase 96,08%. Dapat disimpulkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BPSDM Aceh dapat dikatakan kurang Efisien.

4.3.2 Analisis Efektivitas Anggaran BPSDM Aceh

Efektivitas anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di tunjukkan dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran BPSDM Aceh

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2020	99.180.208.498,00	88.906.420.072,00	89,64%	Cukup Efektif
2021	208.848.070.489,00	185.325.293.861,00	88,74%	Cukup Efektif
2022	190.532.972.899,00	183.056.258.365,00	96,08 %	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPSDM Aceh (Data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas mengenai realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp88.906.420.072,00 dari total anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp99.180.208.498,00 dengan tingkat persentase 89,64%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp10.273.788.426,00 yang tidak

digunakan oleh BPSDM Aceh. Dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup efektif..

2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp185.325.293.861,00 dari total anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp208.848.070.489,00 dengan tingkat persentase 88,74%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp23.522.776.628,00 yang tidak digunakan oleh BPSDM Aceh. Dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada BPSDM Aceh dapat dikatakan cukup efektif..
3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Aceh sebesar Rp183.056.258.365,00 dari total anggaran BPSDM Aceh sebesar Rp190.532.972.899,00 dengan tingkat persentase 96,08%, yang artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp7.476.714.534,00 yang tidak digunakan oleh BPSDM Aceh. Dapat disimpulkan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Tahun 2020 pada BPSDM Aceh dapat dikatakan efektif..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dinilai untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan nilai "Cukup Efisien" dan untuk Tahun 2022 dengan nilai "Kurang Efisien". Dengan tingkat persentase masing-masing dalam tahun tersebut sebesar 89.64% dan 88,74% serta 96,08%
2. Perkembangan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dinilai untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan nilai "Cukup Efektif" dan untuk Tahun 2022 dengan nilai "Efektif". Dengan tingkat persentase masing-masing dalam tahun tersebut sebesar 89.64% dan 88,74% serta 96,08%.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh harus berusaha lebih meningkatkan kinerja pengelolaan terhadap realisasi anggaran belanja ditahun anggaran berikutnya agar pelaksanaan

realisasi anggaran tercapai dengan target anggaran yang telah ditetapkan, dan dapat meningkatkan tingkat efektifitas agar tahun berikutnya masuk dalam kriteria sangat efektif, dan juga untuk meningkatkan efisiensi ditahun berikutnya.

2. Penyerapan anggaran belanja pada BPSDM Aceh Tahun 2020-2022 telah dilakukan dengan analisis menunjukkan penggunaan anggaran yang efisiensi dan efektivitas . Hal ini diharapkan BPSDM Aceh melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik dan maksimal serta menyesuaikan dengan pemberian anggaran sehingga penggunaan anggaran belanja BPSDM Aceh kedepannya memberikan pengaruh yang baik untuk tahun-tahun selanjutnya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti cakupan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: pengelolaan keuangan daerah edisi3: Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Erani Yustika. (2015). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Alim, M. Nizarul. (2008). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10, No. 2.
- Bambang Riyanto. (2007). Manajemen Keuangan Daerah: Analisis Efisiensi dan Efektivitas. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Semarang: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga. Dwi Nofita, S., Sri Mintarti, & Salmah Pattisahusiwa. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Jurnal Kinerja Keuangan Pemerintah.
- Hafiz, Abdul. (2009). Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, & Bawono, Icut Rangga. (2010). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mahmudi, (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Mahmudi, (2018a). Akuntansi Sektor Publik.
- Mahsun, (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik.
- Mahsun, Muhammad (2014), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2004). Efisiensi Dan Efektifitas. Jakarta: Andy.
- Nordiawan, Deddy & Hertiaty Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Pankey, Imanuel & Sherly. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*. 02(01), 142-150.
- Rampengan, Melania & Grace B. Nangoi, H.M. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 13, No. 03.
- Rini Widiarti. (2018). Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pemerintah: Analisis Implementasi di Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto D. Haryono. (2015). Manajemen Anggaran Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
- Sumenge, Ariel Sharon. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3.
- Teguh Prasetyo. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah: Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65-77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12il.92>



PEMERINTAH ACEH
SKPA : 3.00.05.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020 DAN 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	345.100.000,00	189.200.000,00	54,82	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	345.100.000,00	189.200.000,00	54,82	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	345.100.000,00	189.200.000,00	54,82	-
1.1.2.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	265.000.000,00	-	-	-
1.1.2.03.01.	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA	265.000.000,00	-	-	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	39.500.000,00	16.700.000,00	42,28	-
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	39.500.000,00	16.700.000,00	42,28	-
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	39.500.000,00	172.500.000,00	436,71	-
1.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	39.500.000,00	172.500.000,00	436,71	-
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	1.100.000,00	-	-	-
1.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA	1.100.000,00	-	-	-
2.	BELANJA	99.180.208.498,00	88.906.420.072,00	89,64	-
2.1.	BELANJA OPERASI	91.966.875.412,00	83.797.777.506,00	91,12	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	17.024.377.671,00	15.692.510.840,00	92,18	-
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.481.976.098,00	8.331.449.575,00	98,23	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.376.101.043,00	6.261.434.917,00	98,20	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	652.968.000,00	646.833.638,00	99,06	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	253.277.500,00	243.850.000,00	96,28	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	330.480.500,00	322.100.000,00	97,46	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	191.900.000,00	189.950.000,00	98,98	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	314.930.600,00	314.592.480,00	99,89	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.264.000,00	37.042.231,00	96,81	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	863.443,00	84.270,00	9,76	-
2.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	18.450.000,00	12.847.219,00	69,63	-
2.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	39.159.528,00	38.541.509,00	98,42	-
2.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	265.581.484,00	264.173.311,00	99,47	-
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.097.954.632,00	7.088.971.265,00	87,54	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	569.040.000,00	451.180.000,00	79,29	-
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	6.303.600.000,00	5.523.957.820,00	87,63	-
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.225.314.632,00	1.113.833.445,00	90,90	-
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	129.684.000,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.1.1.06.13.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA	129.684.000,00	-	-	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	314.762.941,00	272.090.000,00	86,44	-
2.1.1.07.01.	Uang Lembur PNS	314.762.941,00	272.090.000,00	86,44	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.942.497.741,00	68.105.266.666,00	90,88	-
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.592.716,00	1.973.385.704,00	98,39	-
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	638.660.421,00	632.928.904,00	99,10	-
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	185.737.544,00	179.546.000,00	96,67	-
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	18.240.000,00	4.882.000,00	26,77	-
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.162.954.751,00	1.156.028.800,00	99,40	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	386.956.829,00	243.741.200,00	62,99	-
2.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	800.000,00	-	-	-
2.1.2.02.07.	Belanja Tas	57.934.829,00	54.186.200,00	93,53	-
2.1.2.02.09.	Kegiatan/Perengkapan Peserta	72.230.000,00	72.230.000,00	100,00	-
2.1.2.02.10.	Belanja Cenderamata	62.550.000,00	2.550.000,00	4,08	-
2.1.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	113.350.000,00	39.117.000,00	34,51	-
2.1.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	5.600.000,00	3.000.000,00	53,57	-
2.1.2.02.22.	Belanja bahan kelengkapan lapangan	17.187.500,00	16.640.000,00	96,81	-
2.1.2.02.23.	Belanja bahan kelengkapan sarana perbadatan	7.804.500,00	7.568.000,00	96,97	-
2.1.2.02.25.	Belanja Bahan Laboratorium	49.500.000,00	48.450.000,00	97,88	-
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.629.295.298,00	2.141.881.130,00	81,46	-
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	22.500.000,00	466.849,00	2,07	-
2.1.2.03.02.	Belanja air	342.997.200,00	339.499.020,00	98,98	-
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	739.929.600,00	739.105.194,00	99,89	-
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	45.259.500,00	25.792.000,00	56,99	-
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	55.900.000,00	22.326.656,00	39,94	-
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	23.000.000,00	411.000,00	1,79	-
2.1.2.03.12.	Belanja jasa publikasi	771.000.000,00	447.424.000,00	58,03	-
2.1.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	224.732.000,00	219.722.000,00	97,77	-
2.1.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	225.900.000,00	191.395.111,00	84,73	-
2.1.2.03.16.	Belanja jasa cleaning service	20.076.998,00	18.279.300,00	91,05	-
2.1.2.03.20.	Belanja Jasa	158.000.000,00	137.460.000,00	87,00	-
2.1.2.05.	Administrasi/Pendaftaran/Luran	990.456.030,00	335.555.900,00	33,88	-
2.1.2.05.02.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	274.800.000,00	110.508.250,00	40,21	-
2.1.2.05.03.	Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	691.256.030,00	201.378.250,00	29,13	-
2.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.400.000,00	23.669.400,00	97,01	-
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	478.399.977,00	302.080.975,00	63,14	-
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	349.713.252,00	185.675.600,00	53,09	-
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	128.686.725,00	116.405.375,00	90,46	-
2.1.2.07.	Belanja Sewa	87.100.000,00	86.413.000,00	99,21	-
2.1.2.07.02.	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir kantor/tempat	82.600.000,00	81.928.000,00	99,19	-
2.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	4.485.000,00	99,67	-

31.1.2.3.9 PEMERINTAH ACEH

Permendagri 64

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.911.820.801,00	1.327.173.000,00	69,42	-
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	146.330.000,00	60.741.000,00	41,51	-
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	72.300.000,00	66.301.000,00	91,70	-
2.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihar/Kegiatan	1.693.190.801,00	1.200.131.000,00	70,88	-
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.600.000,00	24.917.750,00	87,13	-
2.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	28.600.000,00	24.917.750,00	87,13	-
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.317.356.992,00	2.038.435.650,00	61,45	-
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.077.868.000,00	926.518.470,00	85,96	-
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.239.488.992,00	1.111.917.180,00	49,65	-
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.212.205.035,00	1.265.080.943,00	57,19	-
2.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.097.297.035,00	1.180.801.043,00	56,30	-
2.1.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	114.908.000,00	84.279.900,00	73,35	-
2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.013.350.000,00	3.442.097.464,00	85,77	-
2.1.2.22.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	6.900.000,00	-	-	-
2.1.2.22.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	162.250.000,00	113.850.000,00	70,17	-
2.1.2.22.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	1.387.550.000,00	1.114.517.214,00	80,32	-
2.1.2.22.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	1.501.650.000,00	1.258.730.250,00	83,82	-
2.1.2.22.05.	Belanja Beasiswa Izin Belajar S2	780.000.000,00	780.000.000,00	100,00	-
2.1.2.22.06.	Belanja Beasiswa Izin Belajar S3	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	-
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	928.371.000,00	430.440.100,00	46,37	-
2.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	928.371.000,00	430.440.100,00	46,37	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	1.181.190.000,00	935.865.206,00	79,23	-
2.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224.300.000,00	194.750.000,00	86,83	-
2.1.2.25.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	239.540.000,00	218.265.206,00	91,12	-
2.1.2.25.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	717.350.000,00	522.850.000,00	72,89	-
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	1.453.350.000,00	1.452.150.000,00	99,92	-
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.453.350.000,00	1.452.150.000,00	99,92	-
2.1.2.29.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	52.131.393.063,00	51.009.978.644,00	97,85	-
2.1.2.29.01.	Uang diberikan kepada Pihak Ketiga.	52.131.393.063,00	51.009.978.644,00	97,85	-
2.1.2.30.	Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti	1.187.060.000,00	1.096.070.000,00	92,33	-
2.1.2.30.01.	Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti.	1.171.710.000,00	1.088.070.000,00	92,86	-
2.1.2.30.02.	Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara	15.350.000,00	8.000.000,00	52,12	-
2.2.	BELANJA MODAL	7.213.333.086,00	5.108.642.566,00	70,82	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.378.751.479,00	1.727.348.200,00	51,12	-
2.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.300.000.000,00	-	-	-
2.2.2.03.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	1.300.000.000,00	-	-	-
2.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	98.500.000,00	97.006.000,00	98,48	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.04.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.000.000,00	31.006.000,00	96,89	-
2.2.2.04.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66.500.000,00	66.000.000,00	99,25	-
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	678.158.500,00	393.357.000,00	58,00	-
2.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	678.158.500,00	393.357.000,00	58,00	-
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	456.609.192,00	450.648.000,00	98,69	-
2.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	58.158.165,00	56.925.000,00	97,88	-
2.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	398.451.027,00	393.723.000,00	98,81	-
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	385.827.562,00	359.095.000,00	93,07	-
2.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	100.672.100,00	99.000.000,00	98,34	-
2.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	263.665.462,00	260.095.000,00	98,65	-
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.490.000,00	-	-	-
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	296.000.000,00	287.017.500,00	96,97	-
2.2.2.18.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	296.000.000,00	287.017.500,00	96,97	-
2.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	163.656.225,00	140.224.700,00	85,68	-
2.2.2.19.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	163.656.225,00	140.224.700,00	85,68	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.834.581.607,00	3.381.294.366,00	88,18	-
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempak Kerja	3.834.581.607,00	3.381.294.366,00	88,18	-
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.834.581.607,00	3.381.294.366,00	88,18	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(98.835.108.498,00)	(88.717.220.072,00)	89,76	-

Banda Aceh, 31 Desember 2020
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aceh

Syaridin, S.Pd, M.Pd
19701231 199512 1 033



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 5.04.0.00.0.00.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 DAN 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	345,100,000.00	-	-	189,200,000.00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	345,100,000.00	-	-	189,200,000.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	345,100,000.00	-	-	189,200,000.00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	265,000,000.00	-	-	-
4.1.02.01.12.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	265,000,000.00	-	-	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	80,100,000.00	-	-	189,200,000.00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	39,500,000.00	-	-	16,700,000.00
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	39,500,000.00	-	-	172,500,000.00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,100,000.00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	208,848,070,489.00	185,325,293,861.25	88,74	88,906,420,072.00
5.1.	BELANJA OPERASI	195,133,565,800.00	179,785,118,477.11	92,13	83,797,777,506.00
5.1.01.	Belanja Pegawai	17,644,399,691.00	16,024,999,215.50	90,82	15,420,420,840.00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9,303,839,731.00	8,632,943,822.50	92,79	8,331,449,575.00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6,771,548,607.00	6,278,765,630.50	92,72	6,261,434,917.00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	707,138,600.00	643,763,732.00	91,04	646,833,638.00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	252,042,000.00	246,030,000.00	97,61	243,850,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	377,835,500.00	375,305,000.00	99,33	322,100,000.00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	216,111,000.00	175,540,000.00	81,23	189,950,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	363,505,424.00	358,768,680.00	98,70	314,592,480.00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	42,208,600.00	41,290,090.00	97,82	37,042,231.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,500,000.00	85,844.00	5,72	84,270.00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	498,150,000.00	461,879,603.00	92,72	264,173,311.00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	27,060,000.00	12,878,786.00	47,59	12,847,219.00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	46,740,000.00	38,636,457.00	82,66	38,541,509.00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7,842,355,960.00	7,076,235,393.00	90,23	5,975,137,820.00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,676,017,960.00	1,338,589,700.00	79,87	451,180,000.00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	339,726,000.00	312,390,000.00	91,95	-
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5,826,612,000.00	5,425,255,693.00	93,11	5,523,957,820.00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	498,204,000.00	315,820,000.00	63,39	1,113,833,445.00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	129,684,000.00	-	-	1,113,833,445.00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	368,520,000.00	315,820,000.00	85,70	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177,489,166,109.00	163,760,119,261.61	92,26	68,377,356,666.00
5.1.02.01.	Belanja Barang	8,195,383,582.00	3,640,071,465.00	44,42	3,027,156,329.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8,195,381,582.00	3,640,071,465.00	44,42	3,027,156,329.00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	22,834,832,450.00	17,723,813,779.00	77,62	9,880,676,300.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	9,843,573,450.00	8,020,416,070.00	81,48	5,921,725,736.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16,020,000.00	12,549,750.00	78,34	-
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	10,000,000.00	-	-	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	113,020,000.00	-	-	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	463,664,000.00	152,640,000.00	32,92	86,413,000.00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	11,660,000,000.00	8,931,969,459.00	76,60	3,442,097,464.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	728,555,000.00	606,238,500.00	83,21	430,440,100.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	5,740,506,500.00	4,191,413,623.61	73,01	2,421,109,743.00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	982,541,713.00	769,584,445.00	78,33	1,156,028,800.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,033,117,287.00	2,896,031,040.61	71,81	1,265,080,943.00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	724,847,500.00	525,798,138.00	72,54	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	5,337,373,577.00	3,641,442,161.00	68,23	2,038,435,650.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,337,373,577.00	3,637,796,561.00	68,16	2,038,435,650.00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	3,645,600.00	-	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135,381,070,000.00	134,563,378,233.00	99,40	51,009,978,644.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	135,381,070,000.00	134,563,378,233.00	99,40	-
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	51,009,978,644.00
5.2.	BELANJA MODAL	13,714,504,689.00	5,540,175,384.14	40,40	5,108,642,566.00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,661,974,064.00	3,095,582,570.00	29,03	1,727,348,200.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	48,000,000.00	47,520,000.00	99,00	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	48,000,000.00	47,520,000.00	99,00	-
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	5,979,706,627.00	-	-	97,006,000.00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5,979,706,627.00	-	-	97,006,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,372,800,767.00	1,013,183,500.00	73,80	844,005,000.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	483,032,138.00	466,783,000.00	96,64	393,357,000.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	889,768,629.00	546,400,500.00	61,41	450,648,000.00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	309,714,230.00	255,310,000.00	82,43	427,242,200.00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	181,114,230.00	153,175,000.00	84,57	287,017,500.00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	105,600,000.00	102,135,000.00	96,72	140,224,700.00
5.2.02.06.03.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	23,000,000.00	-	-	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2,400,000.00	-	-	-
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	2,400,000.00	-	-	-
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	93,610,000.00	65,120,000.00	69,57	-
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	23,210,000.00	-	-	-
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	70,400,000.00	65,120,000.00	92,50	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2,855,742,440.00	1,714,449,070.00	60,04	359,095,000.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	2,776,908,440.00	1,681,926,000.00	60,57	99,000,000.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	78,834,000.00	32,523,070.00	41,26	260,095,000.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,971,130,625.00	2,444,592,814.14	82,28	3,381,294,366.00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	2,971,130,625.00	2,444,592,814.14	82,28	3,381,294,366.00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2,952,740,000.00	2,426,277,814.14	82,17	3,381,294,366.00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	18,390,625.00	18,315,000.00	99,59	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81,400,000.00	-	-	-
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	81,400,000.00	-	-	-
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	81,400,000.00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(208,502,970,489.00)	(185,325,293,861.25)	88,88	(88,717,220,072.00)

Banda Aceh, 31 Desember 2021
**Kepala Badan Pengembangan Sumber
 Daya Manusia Aceh**

Syaridin, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19701231 199512 1 033



PEMERINTAH ACEH
SKPD : 5.04.0.00.0.00.01. - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	344,000,000.00	3,677,945,000.00	1.069,17	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344,000,000.00	3,677,945,000.00	1.069,17	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	344,000,000.00	3,677,945,000.00	1.069,17	-
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	265,000,000.00	3,149,250,000.00	1.188,40	-
4.1.02.01.12.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	265,000,000.00	3,149,250,000.00	1.188,40	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	79,000,000.00	528,695,000.00	669,23	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	39,500,000.00	295,100,000.00	747,09	-
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	39,500,000.00	233,595,000.00	591,38	-
5.	BELANJA DAERAH	190,532,972,899.00	183,056,258,365.48	96,08	185,325,293,861.25
5.1.	BELANJA OPERASI	180,861,776,412.00	173,430,246,921.00	95,89	179,785,118,477.11
5.1.01.	Belanja Pegawai	16,904,476,308.00	16,205,901,085.00	95,87	16,024,999,215.50
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8,709,564,808.00	8,432,094,678.00	96,81	8,632,943,822.50
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6,210,369,534.00	6,054,869,036.00	97,50	6,278,765,630.50
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	567,076,125.00	567,076,125.00	100,00	643,763,732.00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	253,277,500.00	245,840,000.00	97,06	246,030,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	566,365,800.00	526,735,300.00	93,00	375,305,000.00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	168,325,500.00	156,520,000.00	92,99	175,540,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	362,707,013.00	330,742,140.00	91,19	358,768,680.00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	53,727,332.00	52,520,263.00	97,75	41,290,090.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	150,000.00	80,541.00	53,69	85,844.00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	469,450,004.00	447,759,448.00	95,38	461,879,603.00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14,892,600.00	12,487,950.00	83,85	12,878,786.00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	43,223,400.00	37,463,875.00	86,67	38,636,457.00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7,794,211,500.00	7,378,746,407.00	94,67	7,076,235,393.00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,589,650,000.00	1,360,289,907.00	85,57	1,338,589,700.00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	314,913,000.00	308,100,000.00	97,84	312,390,000.00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5,889,648,500.00	5,710,356,500.00	96,96	5,425,255,693.00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400,700,000.00	395,060,000.00	98,59	315,820,000.00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	400,700,000.00	395,060,000.00	98,59	315,820,000.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	163,957,300,104.00	157,224,345,836.00	95,89	163,760,119,261.61
5.1.02.01.	Belanja Barang	7,496,404,194.00	6,736,814,737.00	89,87	3,640,071,465.00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7,496,404,194.00	6,736,814,737.00	89,87	3,640,071,465.00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	23,281,423,745.00	20,932,380,139.00	89,91	17,723,813,779.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	12,299,983,737.00	10,878,409,066.00	88,44	8,020,416,070.00

Sub Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12,240,000.00	11,912,000.00	97,32	12,549,750.00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	1,500,000.00	-	-	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39,980,400.00	32,520,000.00	81,34	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	788,176,000.00	680,486,750.00	86,34	152,640,000.00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PHS	9,721,983,608.00	8,916,162,323.00	91,71	8,931,969,459.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	417,560,000.00	412,890,000.00	98,88	606,238,500.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1,322,561,000.00	1,278,857,225.00	96,70	4,191,413,623.61
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,207,761,000.00	1,165,023,375.00	96,46	769,584,445.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114,800,000.00	113,833,850.00	99,16	2,896,031,040.61
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	525,798,138.00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	6,424,411,165.00	6,220,410,069.00	96,82	3,641,442,161.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,786,295,291.00	5,682,294,195.00	98,20	3,637,796,561.00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	638,115,874.00	538,115,874.00	84,33	3,645,600.00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125,432,500,000.00	122,055,883,666.00	97,31	134,563,378,233.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	125,432,500,000.00	122,055,883,666.00	97,31	134,563,378,233.00
5.2.	BELANJA MODAL	9,671,196,487.00	9,626,011,444.48	99,53	5,540,175,384.14
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,618,796,032.00	4,604,802,800.00	99,70	3,095,582,570.00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	1,535,325,000.00	1,535,325,000.00	100,00	47,520,000.00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	1,535,325,000.00	1,535,325,000.00	100,00	47,520,000.00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,121,599,440.00	1,113,833,800.00	99,31	1,013,183,500.00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	106,185,250.00	100,699,200.00	94,83	466,783,000.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	982,802,390.00	980,522,800.00	99,77	546,400,500.00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32,611,800.00	32,611,800.00	100,00	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,282,365,192.00	1,282,068,000.00	99,98	255,310,000.00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1,271,265,192.00	1,270,968,000.00	99,98	153,175,000.00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	11,100,000.00	11,100,000.00	100,00	102,135,000.00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	65,120,000.00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	-	-	-	65,120,000.00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	679,506,400.00	673,576,000.00	99,13	1,714,449,070.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	358,396,000.00	353,230,000.00	98,56	1,681,926,000.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	321,110,400.00	320,346,000.00	99,76	32,523,070.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,917,532,055.00	4,887,948,906.48	99,40	2,444,592,814.14
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	4,917,532,055.00	4,887,948,906.48	99,40	2,444,592,814.14
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,917,532,055.00	4,887,948,906.48	99,40	2,426,277,814.14
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	18,315,000.00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40,000,000.00	39,611,738.00	99,03	-
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	40,000,000.00	39,611,738.00	99,03	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	40,000,000.00	39,611,738.00	99,03	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94,868,400.00	93,648,000.00	98,71	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	94,868,400.00	93,648,000.00	98,71	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	94,868,400.00	93,648,000.00	98,71	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(190,188,972,899.00)	(179,378,313,365.48)	94,32	(185,325,293,861.25)

Banda Aceh, 31 Desember 2022
**Kepala Badan Pengembangan Sumber
 Daya Manusia Aceh**

Syaridin, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19701231 199512 1 033